JOURNAL SYNTAX IDEA
p–ISSN: 2723-4339 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 03, Maret 2025

POLISI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEKERASAN DI MEDIA (SEBUAH ANALISIS WACANA)

Arif Rayyan Rahman[1], Dyva Claretta[2]
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Indonesia
Email: arayyan.rahman@gmail.com

ABSTRAK

Polisi diharapkan menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, namun kenyataannya sering terjadi tindakan di luar batas prosedur, terutama dalam pengamanan demonstrasi. Media memiliki peran strategis dalam membentuk citra polisi di mata publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana BBC Indonesia membingkai tindakan aparat dalam liputan mengenai demonstrasi penolakan revisi UU Pilkada 2024. Metode yang digunakan adalah Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa BBC Indonesia membingkai aparat sebagai aktor represif melalui penggunaan frasa-frasa seperti “brutalitas polisi” dan narasi berulang kekerasan aparat. Artikel BBC juga mengaitkan tindakan kekerasan dengan kepentingan politik dan menyuarakan perspektif korban sebagai narasi utama. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa media internasional berperan penting dalam membentuk opini publik, dan bahwa citra Polri sangat dipengaruhi oleh cara media menyajikan wacana. Temuan ini menjadi refleksi bagi institusi kepolisian untuk memperbaiki pendekatan dalam menghadapi masyarakat, serta pentingnya penguatan etika jurnalistik dalam menyuarakan isu kekerasan oleh aparat.
Kata kunci : analisis wacana kritis; bbc indonesia; kepolisian negara indonesia

ABSTRACT

The police are expected to be protectors and guardians of the community, but in reality, their actions often occur outside the boundaries of procedure, especially during the securing of demonstrations. The media plays a strategic role in shaping the public's perception of the police. This study aims to analyze how BBC Indonesia frames the actions of the police in its coverage of demonstrations rejecting the revision of the 2024 Pilkada Law. The method employed is Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis model, utilizing a qualitative and descriptive approach. The results of the analysis show that BBC Indonesia frames the police as repressive actors through the use of phrases such as "police brutality" and repeated narratives of violence by the police. The BBC article also links acts of violence to political interests and presents the victim's perspective as the main narrative. The implications of this study suggest that the international media plays a significant role in shaping public opinion, and that the image of the Police is greatly influenced by the way the media presents its discourse. These findings serve as a reflection for the police institution to improve its approach in dealing with the community, as well as the importance of strengthening journalistic ethics in voicing the issue of violence by the police.
Keywords: *critical discourse analysis; bbc indonesia; indonesian national police*

PENDAHULUAN

Dalam keseharian bermasyarakat di Indonesia, polisi menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum dan menciptakan ketertiban (Hasibuan & SH, 2021). Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pengayoman juga menjadi salah satu

tupoksi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) (Arif, 2021). Sebagaimana dilansir pada situs resmi Polri, "Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat". Prinsip ini bersandar pada filisofi yang dianut oleh kepolisian di hampir seluruh negara, yaitu "Vigilant Quiescant", yang bermakna bahwa polisi selalu siaga dan berjaga sepanjang waktu agar masyarakat dapat merasakan rasa aman dan tentram (Sidiq, 2019).

Dengan begitu, idealnya polisi adalah sebagai penegak hukum yang profesional sekaligus menjadi sosok yang dapat dipercaya oleh masyarakat dengan memberikan rasa aman dan menciptakan ketertiban (OA Getsa, 2019). Namun sayangnya dalam perkembangan sosial di masyarakat, banyak ditemui tindakan-tindakan aparat kepolisian yang bertolak belakang dengan hal tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Tolan et al., 2017) menemukan adanya dekadensi moral pada anggota kepolisian sehingga menciptakan pandangan negatif di masyarakat. Polisi dilihat sebagai sebuah alat kekuasaan yang tak pandang bulu dalam mengeksekusi perintah, sehingga sangat dekat kaitannya dengan tindakan represif di mata masyarakat (Setiyono, 2023). Ditambah dalgi dengan aspek profesionalitas yang menjadi sorotan dari masyarakat. Pelaksanaan administratif yang sangat rumit dan berbelit-belit bahkan hingga normalisasi pungutan liar untuk memperlancar urusan menjadi gambaran aparat yang terbayang oleh masyarakat.

Selain anggapan langsung yang muncul dari masyarakat, media juga mendorong anggapan tersebut menjadi lebih jelas dengan mencitrakan aparat kepolisian secara "miring" dalam redaksi beritanya. (Junior, 2023) dalam penelitiannya memperlihatkan bagaimana media Koran Tempo Online menampilkan sikap kepolisian pada penanganan kasus skandal narkoba yang melibatkan salah satu anggota aparat kepolisian, yaitu teddy Minahasa. Tempo menggambarkan tindakan tidak netral yang dilakukan aparat kepolisian dalam menyelidiki kasus ini. Kepolisian terkesan menutup-nutupi dan tidak terbuka terhadap hasil penyelidikan. Selain itu aparat juga dinilai institusi yang gagal dalam menegakkan hukun di negeri ini. Hal ini dilandasi dari terlibatnya perwira tinggi Polri dalam kasus ini.

Media miliki dampak yang begitu signifikan dalam membentuk citra sebuah objek baik instansi maupun individu di dalam benak masyarakat sebagai audiensnya (Sari, 2020). Menurut (Sari, 2020) dampak yang ditimbulkan media terhadap opini masyarakat menjadi semakin cepat dan luas dengan adanya internet. Internet yang tak terbatas ruang hingga waktu menjadi sebuah sarana yang efektif untuk menyebarkan wacana dalam sebuah teks baik tulis, audio, visual, hingga audio visual.

Wacana sendiri menurut Roger Fowler adalah suatu jenis komunikasi lisan atau tertulis dalam artian teks, yang dilihat melihat dari nilai, keyakinan, dan kategori yang ada di dalam teks tersebut. Keyakinan ini menjadi representasi dari ekspresi sebuah pandangan, organisasi, atau pengalaman dunia (Rahman & Hamdani, 2023). Dengan begitu, wacana dapat diartikan sebagai ideologi yang tersimpan di dalam sebuah teks yang berasal dari kepentingan individu dalam pandangannya maupun organisasi.

Pada demonstrasi terjadi pada bulan Agustus 2024 lalu cukup menjadi sorotan oleh media. Demonstrasi yang menyuarakan penolakan revisi UU Pilkada 2024 ini banyak insiden yang melibatkan antara aparat dan peserta aksi. Insiden yang paling menjadi sorotan adalah tindakan represif dari aparat yang dinilai berlebihan. Amnesty International Indonesia (AII) mengungkapkan bahwa aparat telah melakukan tindakan yang berlebihan dalam melakukan tindakan pengamanan terhadap para peserta aksi. Menurut AII, hal ini menjadi bukti dari ketidakpedulian aparat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak masyarakat untuk mneyuarakan pendapatnya. Hak yang dilindungi oleh hukum nasional maupun internasional ini terlihat diabaikan begitu saja dengan dalih pengamanan.

Selain penindasan terhadap hak masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya dengan menggunakan tindakan represif, aparat jug dinilai mencederai marwah profesi jurnalis. Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), mengungkapkan terdapat puluhan jurnalis yang mendapatkan tindakan kekerasa secara fisik maupun psikis. Selain itu terdapat juga jurnalis yang mendapatkan ancaman kematian dari aparat saat melakukan tugasnya meliput demonstrasi tersebut. KKJ mengecam tindakan tersebut dan mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dari Pasal 18 Ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 351 KUHP dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat.

BBC sebagai media internasional memiliki dampak yang signifikan dalam pemberitaanya terhadap opini pada sebuah peristiwa. Pada peristiwa demonstrasi tersebut, BBC membuat dua artikel liputan khusus yang memperlihatkan bagaimana tindakan aparat terhadap peserta demonstrasi. Dua artikel tersebut adalah "Kesaksian keluarga demonstran tolak RUU Pilkada yang jadi korban kekerasan aparat - 'Anak saya melawan ketidakadilan, kenapa diperlakukan seperti binatang?" (23/08/2024), dan "Repetisi 'brutalitas polisi' dalam demonstrasi revisi UU Pilkada, mengapa terus berulang?" (08/09/2024). Dan pada penelitian ini, yang menjadi fokus adalah artikel yang diterbitkan pada tanggal 08 Agustus 2024.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menganalisis bagaimana media mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai kepolisian di Indonesia, terutama dalam konteks tindakan kekerasan. Kesadaran masyarakat tentang tindakan represif yang mungkin terjadi terhadap mereka, terutama dalam demonstrasi, menunjukkan bahwa ada krisis kepercayaan antara warga dan lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi wacana media yang mengelilingi institusi kepolisian, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang citra polisi di mata publik.

Meskipun ada banyak penelitian yang menyoroti pandangan negatif masyarakat terhadap kepolisian, masih terdapat celah dalam memahami bagaimana wacana media, khususnya dari outlet internasional seperti BBC Indonesia, membentuk dan mengubah narasi ini. Belum banyak yang mengeksplorasi pengaruh spesifik dari artikel-artikel media internasional terhadap opini masyarakat mengenai tindakan kekerasan aparat dalam konteks demonstrasi.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti oleh Tolan et al., (2017) dan (Sulistiyawan Junior, 2023), telah menginvestigasi tentang citra kepolisian di media, namun fokusnya lebih kepada media lokal. Penelitian ini akan melengkapi literatur yang ada dengan menganalisis wacana kritis terhadap berita-berita dari BBC Indonesia, yang dianggap memiliki dampak signifikan di kalangan publik. Novelty dari penelitian ini akan terlihat pada penggunaan model analisis wacana kritis Norman Fairclough sebagai kerangka untuk memahami berita dari BBC Indonesia. Hal ini akan memberikan perspektif baru dalam analisis bagaimana wacana media internasional berinteraksi dengan kekuatan institusi lokal dan pembentukan opini publik di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis wacana diskursif yang diangkat oleh BBC Indonesia tentang kekerasan polisi dalam demonstrasi masyarakat, serta untuk mengeksplorasi implikasi dari wacana tersebut terhadap citra kepolisian di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai interaksi antara media, masyarakat, dan institusi kepolisian.

METODE PENELITIAN

Dalam usaha menggali wacana yang ada di dalam teks berita di BBC Indonesia, analisis wacana kritis (AWK) milik Norman Fairclough digunakan dalam penelitian ini. Fairclough membagi teks ke dalam tiga dimensi untuk bisa mendapatkan gambaran utuh sebuah teks dalam wacana (Fairclough, 2013). Dimensi pertama adalah dimensi teks yang melihat wacana melalui aspek kebahasaan sebuah teks. Pada dimensi ini, teks dilihat utuh apa adanya berusaha memaknai apa yang dimaksud oleh teks tersebut. Dimensi kedua adalah dimensi diskursif yang ingin melihat aspek produksi hingga konsumsi sebuah teks. Hal ini termasuk ideologi produsen teks dan juga apa yang melatarbelakanginya. Dan dimensi ketiga adalah dimensi praktik sosial yang melihat aspek situasional saat teks dibuat dan aspek institusional yang melatarbelakangi sebuah teks.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana fokusnya terletak pada penggalian makna dari teks berita yang akan dianalisis. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya untuk mempelajari wacana media dalam konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi pembentukan opini publik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan secara mendetail elemen-elemen wacana dalam teks, serta menganalisis bagaimana elemen tersebut berkontribusi pada pembentukan citra kepolisian di kalangan masyarakat. Penelitian ini juga berusaha menjelaskan makna dari setiap elemen wacana yang dianalisis.

Sumber data pada penelitian ini berdasarkan pada dokumentasi objek dan studi literatur yang mencakup berbagai teks ilmiah serta berbagai sumber relevan yang kredibel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memilih dan mengumpulkan artikel yang relevan sebagai bahan analisis. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Norman Fairclough, yang memiliki tiga dimensi yang dijelaskan sebelumnya. Data yang telah

dikumpulkan kemudian dianalisis dengan triangulasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang wacana yang terkandung dalam teks berita, serta implikasinya terhadap pembentukan opini masyarakat mengenai polisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Teks

Dalam aspek teks, dapat terlihat wacana dari pencitraan polisi yang dibungkus di dalam artikel dari BBC ini. Disini akan dibelah bagaimana sebuah teks tidak sekedar naratif yang ingin memberikan sebuah informasi, melainkan sebagai media pembawa wacana yanf terbentuk dari ideologi produsen teks itu sendiri. Dalam produk teks ini BBC Indonesia banyak menyematkan frasa-frasa yang dengan gamblang dapat terlihat sebagai "serangan" terhadap citra Polri. Artikel yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah ("Repetisi 'brutalitas polisi' dalam demonstrasi revisi UU Pilkada, mengapa terus berulang?". Dari dua artikel ini pembedahan wacana terkait citra Polri dalam demonstrasi penolakan Revisi UU Pilkada akan dilakukan.

1. Brutalitas Polri Sebagai Masalah yang Berulang

Wacana ini diproduksi oleh BBC Indonesia pada Judul artikel yang menggambarkan tindakan polisi yang berlebihan dan pengulangannya yang sering terjadi. Judul berita tersebut berbunyi, "Repetisi 'brutalitas polisi' dalam demonstrasi revisi UU Pilkada, mengapa terus berulang?". Dalam teks ini BBC menganggap bahwa kekerasa yang dilakukan aparat di dalam demonstrasi merupaka hal yang rutin dan acap kali terjadi. Hal ini di indikasikan dengan penggunaan frasa "*Repetisi*" dan "*Berulang*" yang sama-sama bermakna terjadi berkali-kali atau tidak sekali terjadi. Dengan begitu dalam pernyataannya, BBC memberikan pandangan bahwa kebrutalan adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggapi atau melakukan tindakan terhadapa peserta aksi demonstrasi.

2. Polisi dan Kedekaannya dengan Kekerasan

Wacana kedua ini muncul pada paragraf 1 (1) yang bertuliskan "*... sejumlah demonstran di berbagai daerah mengaku masih merasakan dampak akibat aksi kekerasan yang diduga dilakukan aparat polisi. Salah satu di antara mereka terancam mengalami kebutaan.*" Dari teks ini tergambarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian serta dampaknya terhadap peserta aksi demonstrasi. Pada teks tersebut juga menggambarkan dampak yang ditimbulkan dari tindakna represif aparat terhadap peserta aksi. Salah satu yang menjdai *highlight* utama dari dampak yang ditimbulkan dari tindakan aparat tersebut adalah ancaman kebutaan yang dialami oleh salah satu pesert aksi. Dari situ dapat terlihat bahwa BBC ingin menggambarkan seberapa besar dampak dari tindakan yang aparat lakukan terhadap "korbannya".

Melalui teks tersebut, BBC mengisyaratkan adanya tindakan yang dilakukan oleh aparat hingga menyebabkan dampak yang serius, seperti kebutaan (Huempfner-Hierl et al., 2015) dalam penelitiannya mengidentifikasi salah satu penyebab dari kebutaan akibat trauma adalah melalui hantaman yang keras pada kepala dari benda tumpul. Salah satu

alat yang menjadi alat pengendalian massa yang digunakan oleh aparat adalah tongkat T (GR Pandelaki, 2018). Hal tersbut kemudian diperjelas lagi oleh BBC melalui foto yang disematkan di dalam artikel beritanya yang memperlihatkan aparat dengna perlengkapan pengendalian massa, salah satunya adalah tongkat T.

3. Aparat dan Peran Poltiknya

Dalam artikel yang diproduksi oleh BBC, terdapat juga indikasi wacana yang memberikan gambaran terkait relasi antara aparat kepolisian dengan peran politiknya atau dalam hal ini digambarkan sebagai alat kekuasaan. Pada paragraf ke-8 (1), disematkan bahwa aparat kepolisian mengambil andil dalam mempertahankan kepentingan penguasa melalui perannya dalam "menertibkan" demonstrasi dengan kekuatan yang berlebihan. "*Sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo, pengerahan kekuatan yang berlebihan kerap menjadi jawaban bagi berbagai protes publik, misalnya dalam gelombang aksi 'Reformasi Dikorupsi pada 23-30 September 2019 lalu.*"

Dalam teks tersebut juga direlasikan secara langsung kekuasaan yang dimaksud adalah presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Di dalamnya, BBC menjabarkan kecenderungan pemerintahan Joko Widodo dalam menaggapi protes yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu melalui pengerahan aparat dan penggunaan kekuatan berlebih. Hal ini relevan dengan wacana sebelumnya yang menyatakan repetisi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Kemudian BBC juga menyematkan masa kepemerintahan Joko Widodo yang telah dua periode atau 10 tahun untuk memperjelas seberapa serignya kecenderungan ini terjadi. (Khoirunnisa & Jubaidi, 2023) menjelskan bahwa sebagai aparat penegak hukum, polisi harusnya dapat mengambil keputusan dan tindakan yang setara dan sama rata berdasarkan pedoman hukum tanpa dipengaruhi oleh kepentingan dari siapapun termasuk pemerintah.

Dengan begitu, secara utuh teks ini dapat dilihat sebagai relasi antara aparat dan kepentingan penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah, dalam menjaga kekuasaannya melalui pembungkaman suara masyarakat yang diekspresikan melalui demonstrasi. Pembugnkaman dilakukan melalui pengerahan aparat dan tindakan represif yang berlebihan untuk mengintimidasi dan membubarkan aksi demonstrasi. Hal ini juga mnejadi indikasi bahwa tindakan aparat merupakan momok bagi demonstrasi dan pemerintah juga enggan mendengar ekspresi suara rakyat melalui demonstrasi.

4. Kekerasan yang Merata

Wacana berikutnya yang menjadi perhatian di dalam teks artikel yang diproduksi oleh BBC Indonesia adalah adanya isyarat yang menyatakan bahwa kejadian atau fenomena kekerasan aparat terhadap masyarakat di dalam unjuk rasa tidak hanya terjadi secara berulang, tetapi juga merata di berbagai daerah di Indonesia. Pada paragraf 9 dituliskan, "*Aksi represif serupa juga terjadai saat protes UU Cipta Kerja, protes warga Air Bangis di Sumatera Barat, Rempang-Galang di Batam, hingga protes warga Dago Elos di Bandung.*" Hal ini menggambarkan bagaimana aparat menggunakan titndakan agresi dalam pelaksanaan tugas pengamanan demonstrasi secara global di daerah-daerah

di Indonesia. Dari teks ini BBC Indoensia ingin menyatakan bahwa apa yang terjadi saat demonstrasi penolakan revisi UU Pilkada 2024 bukanlah satu-satunya peristiwa yang terjadi, melainkan hanya salah satu dari berbagai fenomena serupa yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia.

Fenomena atau peristiwa demonstrasi yang diambil oleh BBC sebagai contoh tidak hanya seputar peristiwa politik seperti protes penolakan UU Cipta Kerja, tetapi juga mencakup kejadian-kejadian yang berakar dari masalah konflik yang melibatkan kepentingan pemerintah dengan hak masyarakat secara sosial. Seperti pada konflik Rempang-Galang yang dilandasi oleh protes warga yang empat tinggalnya harus tergusur akibat proyek strategis, hingga protes warga Dago Elos terhadap maraknya mafia tanah di daerah mereka. Sitorus & Amal, 2022) mengungkapkan bahwa penyebab dari terjadinya tindakan kekerasan oleh aparat dari institusi Polri diantaranya adalah karena kurang memadainya pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh anggota aparat kepolisan selama peroses menjadi anggota polisi.

5. Brutalitas Polisi di Mata Warga

Selain mengangkat kejadian langsung yang ada di lapangan, BBC juga mengangkat kesaksian dari masyarakat yang menyaksikan peristiwa demonstrasi tersebut. Pada paragraf 10 tertulis "*Warga menggunakan istilah "brutalitas polisi" untuk menggambarkan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi*." Dari sini BBC ingin mengambil sudut lain untuk mendapatkan penilaian terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat. Penilaian ini datang dari masyarakat yang menyaksikan kejadian yang terjadi selama demonstrasi, dan masyarakat sendiri menilai tindakan yang dilakukan oleh aparat merupaka tindakan yang brutal. Penilaian ini juga dapat menjadi indikator dari apa yang menjadi pemahaman masyarakat terhadap institusi Polri sekaligus menjadi citra Polri di masyarakat (Maulyan et al., 2022).

Ini menjadi salah satu usaha dari BBC untuk mendapatkan keberimbangan dalam penyampaian beritanya, karena pernyataan tidak hanya datang dari satu pihak, melainkan juga datang dari pihak lain. Keberimbangan ini menjadi jalan untuk memastikan bahwa berita tidak berat sebelah dan hanya menjadi tudingan dari satu pihak semata. Hal ini juga menjadi bukti bahwa antara apa yang dilaporkan selaras dengan apa yang menjadi fakta di lapangan.

Dimesi Diskursif

Pada dimensi diskursif yang ingin dilihat adalah aspek produsen, atau dalam hal ini adalah BBC sebagai media. BBC sebagai media pemberitaan publik yang mendapatkan pendanaan dari publik melalui pajak warga Inggris cenderung menampilkan kentralan dalam menampilkan beritanya. Ketidakberpihakannya pada aspek politik dan kenegaraan bahkan di tengah konflik multinasional menjadi sebuah identitas unik yang dimiliki oleh BBC dan dicitrakan kepada masyarakat. Salah satu yang melandasi hal ini adalah adanya *Royal Charter* yang menjadi pemisah kepentingan politik pemerintah dan kebebsan pers BBC sebagai media. Selain menjaga keberpihakan BBC

terhadap kepentingan politik, dengan model pembiayaan publiknya, BBC juga tidak mementingkan "*wow aspect*" untuk mendapatkan sensasi dan memenuhi kepentingan komersil dalam rangka mencari keuntungan melalui kuantitas audiens dan menjaga kualitas jurnalistiknya.

Kecenderungan BBC Indonesia terhadap pihak yang termarjinalkan juga menjadikan berita yang diangkat oleh BBC mengambil *point of view* dari mereka yang menjadi "korban". Hal ini dilandasi alasan adanya kepentingan untuk memberitakan sisi lain yang tidak terberitakan oleh media arus utama. Sehingga fokus yang diangkat adalah dari sisi mereka yang juga belum terlingkup oleh media arus utama. Selain itu, *Royal Charter* yang memandati BBC untuk dapat berpengaruh terhadap kepentingan orang banyak menjadikan berita yang dihasilkan mengambil posisi pihak minoritas dan minim dilirik oleh media lain (AI Asmaradhani, 2019).

Independesi secara pendanaan dan adanya *Royal Charter* yang mnejadi pembatas antara kepentingan politik dan kebebesan jurnalistik sebagai media menjadikan hasil jurnailistik dari BBC cenderung bebas dalam menggunakan frasa-frasa yang bersifat "ekstrem" dalam teks berita yang dibuatnya. Selain itu, penggunaan data yang lebih banyak datang dari non-oficial, seperti rilis resmi dari otoritas menjadikan berita yang disampaikan oleh BBC cenderung menampilkan sisi berbeda daripada arus *mainstream* di Indonesia. Dimensi diskursif juga akan melihat aspek konsumen, dalam hal ini konsumen teks kemudian disebut sebagai audiens. Audiens pada teks ini dilihat melalui interaksi pada kolom komentar Instagram BBC Indonesia, @bbcindonesia. Pada kolom komentar ditemukan mayoritas audiens setuju dengan narasi yang dibangun oleh BBC Indonesia terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Audiens juga memberikan tanggapan tentang citra Polri yang memburuk dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Disamping audiens yang setuju, beberapa komentar juga menyatakan sebaliknya. Mereka menyalahkan peserta aksi demonstrasi sebagai pemicu kerusuhan dan tindakan yang dilakukan oleh aparat adalah sebuah tindakan yang pantas untuk meredam kerusuhan. Namun setiap komentar yang menyatakan kontra dengan narasi utama akan dibalas dengan komentar yang membantahnya dan mengembalikan argumen kepada narasi utama, yaitu tindakan yang dilakukan aparat adalah sebuah tindakan yang kelewatan dan juga polisi telah rusak citranya. Dengan melihat komentar yang ada di postingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa narasi yang dibangun oleh BBC Indonesia berhasil mempengaruhi audiens. Hal ini terlihat dari dukungan audiens pada kolom komentar terhadap narasi yang dibangun oleh BBC Indonesia. Mereka yang berpendapat kontra bahkan mendapat tanggapan kontra secara langsung oleh audiens lainnya tanpa ada campur tangan dari tanggapan BBC Indonesia. Dengan begitu, citra polisi yang digambarkan oleh BBC pada teksnya menjadi selaras dengan perspektif masyarakat.

Dimensi Sosialkultural

Dalam analisis wacana kritis BBC Indonesia terkait kekerasan polisi dalam demonstrasi, dimensi sosialkultural turut mempengaruhi bagaimana wacana tersebut dikonstruksi dan diterima oleh masyarakat. BBC Indonesia tidak hanya melihat aspek kekerasan semata, tetapi juga bagaimana pemahaman sosial dan budaya masyarakat berkontribusi terhadap persepsi mereka terhadap institusi kepolisian. Dari hasil analisis, ditemukan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh aparat sering kali dipahami melalui lensa pengalaman sejarah dan konteks sosial yang lebih luas. Masyarakat Indonesia memiliki latar belakang sosial yang kaya akan nilai-nilai kolektivitas dan penghormatan terhadap otoritas, namun pengalaman traumatis dengan kekerasan negara menciptakan ketegangan antara ekspektasi ideal masyarakat terhadap kepolisian dan realitas tindakan represif yang terjadi.

Hal ini mengindikasikan bahwa wacana media seperti yang disajikan oleh BBC memungkinkan masyarakat untuk merefleksikan dan mengkritisi tindakan aparat dalam konteks lebih besar. Namun, satu kekurangan yang mencolok dalam penelitian ini adalah tidak adanya data kuantitatif yang dapat mendukung analisis wacana ini. Data kuantitatif, seperti survei opini publik mengenai persepsi terhadap polisi sebelum dan setelah kejadian demonstrasi, bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang dampak kekerasan aparat terhadap citra kepolisian di masyarakat. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Tolan et al. (2017), menunjukkan pentingnya data kuantitatif dalam menggambarkan hubungan antara media dan persepsi publik. Dengan demikian, pengumpulan data kuantitatif dalam penelitian mendatang akan sangat dianjurkan untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif terhadap temuan kualitatif.

Analisis ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian lain yang belum disebutkan sebelumnya, seperti penelitian oleh Sitorus & Amal (2022) yang menunjukkan kurangnya pelatihan dan pendidikan di kalangan aparat kepolisian sebagai salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tindakan kekerasan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa tindakan represif bukan hanya hasil dari keputusan individu, tetapi juga merupakan refleksi dari sistem sosial dan kultural yang lebih besar. Dengan mengangkat wacana mengenai kekerasan polisi, media dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap tindakan aparat dan memperjuangkan perubahan dalam praktik kepolisian yang lebih merangkul prinsip-prinsip hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Dari teks yang dimuat di dalam berita yang dipublikasi oleh BBC Indonesia, digambarkan Polri sebagai pihak “jahat” yang menentang demokrasi dengan berbagai tindakan represif berlebihan hingga dicap sebagai tindakan brutal. Brutalitas Polri ini tidak sekedar pernyataan BBC sebagai media, melainkan gambaran langsung dari apa yang terjadi serta menjadi pemahaman publik terhadap Instansi Polri. Penyusunan teks tersebut dilatarbelakangi oleh ideologi BBC yang bebas dalam berpendapat dan tidak terikat oleh kepentingan politik maupun komersil manapun. Hal ini juga berdampak pada positioning BBC yang cenderung mengambil POV dari mereka yang menjadi “korban”.

Kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang menurun, menjadikan teks ini sebagai penjelas sekaligus kritik terhadap instansi Polri untuk mengembalikan citra instansinya.

DAFTAR PUSTAKA

Ai Asmaradhani. (2019). Implicit Stances Taken By Abc And Bbc Towards Indonesia Presidential Election: Cda Perspectives. *Jurnal.Untirta.Ac.Idai Asmaradhanijournal Of English Language Studies, 2019•Jurnal.Untirta.Ac.Id*, *4*, 197–211. Https://Jurnal.Untirta.Ac.Id/Index.Php/Jels/Article/View/6226

Arif, M. (2021). Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Ojs.Uniska-Bjm.Ac.Id*. Https://Ojs.Uniska-Bjm.Ac.Id/Index.Php/Aldli/Article/View/4165

Gr Pandelaki. (2018). Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Ejournal.Unsrat.Ac.Idgr Pandelakilex Et Societatis, 2018•Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, *5*. Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/View/20367

Hasibuan, E., & Sh, M. (2021). *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*. Https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=9x3eeaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Dalam+Keseharian+Bermasyarakat+Di+Indonesia,+Polisi+Menjadi+Ujung+Tombak+Dalam+Penegakan+Hukum+Dan+Menciptakan+Ketertiban.+&Ots=Tmyhgrxkrg&Sig=W0j0eqnqaviquurcq2tec3ht_Ba

Huempfner-Hierl, H., Bohne, A., Wollny, G., Sterker, I., & Hierl, T. (2015). Blunt Forehead Trauma And Optic Canal Involvement: Finite Element Analysis Of Anterior Skull Base And Orbit On Causes Of Vision Impairment. *British Journal Of Ophthalmology*, *99*(10), 1430–1434. Https://Doi.Org/10.1136/Bjophthalmol-2015-306646

Khoirunnisa, & Jubaidi, D. (2023). Political Configuration Of Law In Law Enforcement In Indonesia. *Ilomata International Journal Of Social Science*, *4*(4), 560–576. Https://Doi.Org/10.52728/Ijss.V4i4.880

Maulyan, F. F., Drajat, D. Y., Angliawati, R. Y., & Sandini, D. (2022). Pengaruh Service Excellent Terhadap Citra Perusahaan Dan Loyalitas Pelanggan: Theoretical Review. *Ejurnal.Ars.Ac.Idff Maulyan, Dy Drajat, Ry Angliawati, D Sandinijurnal Sains Manajemen, 2022•Ejurnal.Ars.Ac.Id*, *4*(1), 2685- 6972. Http://Ejurnal.Ars.Ac.Id/Index.Php/Jsm/Article/View/660

Rahman, E. F., & Hamdani, A. (2023). Strategi Penggunaan Kosakata Dan Tata Bahasa Pada Berita Media Online Indonesia (Analisis Wacana Kritis Model Roger Fowler). *Metafora: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra*, *10*(1), 13. Https://Doi.Org/10.30595/Mtf.V10i1.17670

Oa Getsa. (2019). *Efektivitas Peradilan Etika Kepolisian: Study Di Polda Diy*. Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/23232/

Sari, I. M. (2020). The Online Media Practice In Covering Indonesian National Police's Prevention Efforts On The Prohibited Party's Ideology Spread In Indonesia. *Ijeltal (Indonesian Journal Of English Language Teaching And Applied Linguistics)*, *5*(1), 149. Https://Doi.Org/10.21093/Ijeltal.V5i1.632

Setiyono, B. (2023). *Birokrasi Dalam Perspektif Politik Dan Administrasi*. Https://Books.Google.Com/Books?Hl=Id&Lr=&Id=Sswoeaaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pp1&Dq=Polisi+Dilihat+Sebagai+Sebuah+Alat+Kekuasaan+Yang+Tak+Pandang+Bulu+Dalam+Mengeksekusi+Perintah,+Sehingga+Sangat+Dekat+Kaitannya+De

ngan+Tindakan+Represif+Di+Mata+Masyarakat&Ots=Uytehqtie0&Sig=Fh7xkv5qrnxbnrrnutat94qfkqy
Sidiq, M. (2019). *Komunitas Keamanan Terpadu Dalam Mewujudkan Ketertiban Dan Keamanan Di Lingkungan Sukarame (Studi Kasus Kebijakan Lurah*. Https://Repository.Radenintan.Ac.Id/5787/1/Skripsi.Pdf
Sitorus, R. M., & Amal, B. K. (2022). Police Professionalism In Prevention Of Violent Criminal Acts By The Police In Indonesia. *Randwick International Of Social Science Journal*, *3*(1), 102–115. Https://Doi.Org/10.47175/Rissj.V3i1.380
Sulistiyawan Junior, D. (2023). *In He Online Media Frame (Framing Analysis Of Teddy Minahasa Drug Case In The October 15, 2022 Edition Of Koran Tempo Online)*. Https://Doi.Org/10.46799/Ijssr.V3i8.474
Tolan, C., Mingkid, E. (2017). Peranan Komunikasi Dalam Membangun Citra Polisi Republik Indonesia (Polri) Pada Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kleak, Kecamatan. *Ejournal.Unsrat.Ac.Idca Tolan, E Mingkid, Er Kalesaranacta Diurna Komunikasi, 2017•Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, *Vi*(1). Https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Actadiurnakomunikasi/article/view/15477

Copyright holder:
Arif Rayyan Rahman[1], Dyva Claretta[2] (2025)

First publication right:
Syntax Idea

This article is licensed under: